



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2019

Fachri Rasyidi¹⁾, Albertus Maqnuus Soesilo²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author: fachriryasidi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari BPS. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah ketimpangan distribusi sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, investasi dan inflasi sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara variabel indeks pembangunan manusia dan investasi berpengaruh positif. Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memaksimalkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dengan harapan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih baik.

Kata Kunci: Ketimpangan, Pendapatan, Yogyakarta

JEL Klasifikasi: D63, D31, R11

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan kecenderungan akan meningkatnya atau tumbuhnya output perkapita jangka panjang. Dalam hal ini peningkatan tersebut bersumber dari proses dalam (*intern*) perekonomian itu sendiri. Peningkatan tersebut bersumber dari proses yang dinamakan *self generating* yang berarti proses pertumbuhan untuk keberlangsungan periode selanjutnya (Boediono, 1994). Menurut Sukirno (2006), perubahan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan riil daerah menggunakan indikator PDRB dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS angka PDRB ADHK Provinsi Jawa-Bali menunjukkan angka yang cukup bervariasi dengan data sebagai berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi di Pulau Jawa dan Bali

| Provinsi | Tahun | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| DKI Jakarta | 5.91 | 5.87 | 6.20 | 6.11 | 5.82 |
| Jawa Tengah | 5.47 | 5.25 | 5.26 | 5.3 | 5.4 |

| | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|
| Jawa Timur | 5.44 | 5.57 | 5.46 | 5.47 | 5.52 |
| Jawa Barat | 5.05 | 5.66 | 5.33 | 5.65 | 5.07 |
| Banten | 5.45 | 5.28 | 5.75 | 5.77 | 5.29 |
| DIY | 4.95 | 5.05 | 5.26 | 6.2 | 6.59 |

Sumber : BPS (2020)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat terdapat perbedaan laju pertumbuhan PDRB diantara provinsi-provinsi Jawa dan Bali. Provinsi DIY menduduki peringkat paling bawah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 5,61% per tahun.

Perubahan struktur pendapatan sering mengiringi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada negara berkembang umumnya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh pemerataan pendapatan (Nangarumba, 2015). Sehingga, peningkatan produksi dalam suatu perekonomian akan menyebabkan kesenjangan yang lebih dalam antara si miskin dan si kaya (Nugraha *et. al*, 2020). Ketimpangan memiliki kaitan erat dengan berlakunya kebijakan desentralisasi pada suatu daerah, yang berarti setiap daerah berhak mengembangkan perekonomiannya masing-masing (Amri & Nazamuddin, 2018). Dengan begitu potensi SDA dan SDA dapat menjadi sebuah keunggulan pada masing-masing daerah. Namun di sisi lain masih kurangnya suatu daerah dalam menangkap potensi masing-masing menyebabkan terjadinya ketimpangan pada laju pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Mahardiki & Santoso, 2013).

Tabel 2. Nilai Gini Rasio Tahun 2019 di Provinsi Pulau Jawa

| Provinsi | Indeks Gini |
|-------------|-------------|
| DKI Jakarta | 0.39 |
| Jawa Tengah | 0.36 |
| Jawa Timur | 0.37 |
| Jawa Barat | 0.40 |
| Banten | 0.36 |
| DIY | 0.42 |

Sumber : BPS (2020)

Berdasarkan tabel 2 terdapat perbedaan nilai rasio gini pada masing-masing provinsi. Dilihat dari nilainya provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio gini paling kecil yaitu 0,36. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang nilai rasio gininya paling tinggi diantara yang lain dengan nilai 0,42. Yang artinya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ketimpangan distribusi paling besar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan memiliki korelasi yang cukup kompleks. Wahiba & El Weriemmi (2014) mengemukakan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang positif, yang artinya terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkat pula ketimpangan pendapatannya. Selanjutnya Danawati, Bendesa, & Utama (2016) dan Didia (2016) mengemukakan tidak adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan di Bali. Berangkat dari beberapa *research gap* yang telah dikemukakan diatas, penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota DIY.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Dengan data yang diambil yaitu: (1) Indeks Gini; (2) Pertumbuhan PDRB; (3) Indeks Pembangunan Manusia; (4) Investasi; dan (5) Inflasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data panels dengan periode waktu tahunan dengan rentang waktu 2010-2019. Sedangkan untuk cross section-nya berupa lima kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi DIY.

Gini Ratio (CA) merupakan suatu indeks yang menggambarkan persebaran pendapatan suatu wilayah atau suatu negara. Seperti indeks lainnya, indeks gini mempunyai besaran yang berikisar antara 0 dan 1. Apabila indeks gini sebesar 1 berarti terjadi ketimpangan absolut dan sebaliknya. Pertumbuhan PDRB menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan PDRB diperoleh dari jumlah PDRB tahun sekarang dikurangi dengan jumlah PDRB satu tahun sebelumnya lalu dibagi dengan PDRB satu tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB yang digunakan adalah PDRB AHK dalam bentuk satuan persentase. Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukur perbandingan yang di proksikan dari pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran. Investasi adalah realisasi penjumlahan dari PMDN dan PMA yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DIY. Investasi yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk rupiah yang kemudian dirubah mnejadi bentuk logaritma. Inflasi merupakan kenaikan dalam tingkat harga umum, atau merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus-menerus. Inflasi yang digunakan adalah data inflasi Provinsi DIY dalam satuan persentase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Uji t

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

| | t stat | Prob. | Keterangan |
|------|--------|-------|---|
| PDRB | -3,536 | 0,001 | Berpengaruh negatif secara signifikan |
| IPM | 0,748 | 0,458 | Berpengaruh positif secara tidak signifikan |
| INV | 2,133 | 0,039 | Berpengaruh positif secara signifikan |
| INF | -2,890 | 0,006 | Berpengaruh negatif secara signifikan |

Berdasarkan $k = 4$, $n = 50$, dan alfa 5% maka didapatkan t tabel sebesar 2,013. Berdasarkan penghitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hanya variable IPM yang tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap variable dependen.

Uji F

Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji F)

| F table | F stat | Prob. |
|---------|--------|-------|
| 2,81 | 12,733 | 0,000 |

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai F hitung sebesar 12,733 dan probabilitas sebesar ($0,00 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan seluruh variabel bebas yaitu PDRB, IPM, investasi, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Uji R²

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

| R-Squared | Adj. R-Squared |
|-----------|----------------|
| 0,713 | 0,657 |

Berdasarkan pengujian nilai *Adjusted R²* menunjukkan angka sebesar 0,657 atau dengan kata lain variable PDRB, IPM, investasi, inflasi dapat menjelaskan variable ketimpangan di Provinsi DIY sebesar 65,7%, sementara 34,3% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

Uji Regresi Model *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa hanya variable IPM saja yang tidak berpengaruh, sementara PDRB, investasi, dan inflasi menunjukkan angka yang signifikan secara statistic terhadap ketimpangan pendapatan.

Tabel 6 Hasil Estimasi Regresi Model *Fixed Effect*

| Variabel | Koefisien |
|----------|-----------|
| C | -0,459 |

| | |
|-----------|----------------------|
| | (0,360) |
| PDRB | -0,033*** (0,001) |
| IPM | 0,006 (0,458) |
| Investasi | 0,075** (0,039) |
| Inflasi | -0,011*** (0,006) |

Berdasarkan persamaan di atas berikut persamaan pada penelitian ini:

$$GR_{it} = -0,459 - 0,033PDRB_{it} + 0,006IPM_{it} + 0,075INV_{it} - 0,011INF_{it}$$

3.2. Pembahasan

Laju PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil yang didapat laju PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY. Koefisien variabel laju PDRB bernilai -0,033 yang artinya apabila laju PDRB meningkat 1% maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,033%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah pada Provinsi DIY menunjukkan perkembangan yang baik. Setiap pertumbuhan yang terjadi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di DIY. Hal ini sejalan dengan konsep Todaro & Smith (2006), karakter pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penentu apakah pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap masyarakat miskin atau tidak. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY merupakan pertumbuhan berbasis modal yang mayoritas berasal dari sektor pariwisata. Peningkatan pada sektor pariwisata menjadi stimulus terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan menurunnya ketimpangan pendapatan.

IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil IPM tidak memiliki hubungan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY. Koefisien variabel IPM bernilai 0,006. Yang artinya apabila terdapat peningkatan sebesar 1% pada IPM maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan angka 0,006. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Brata (2002). Penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan pada IPM di suatu daerah yang tidak merata di daerah lain dapat memunculkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Kualitas penduduk yang meningkat namun tidak terjadi peningkatan secara merata akan memperburuk ketimpangan pendapatan. IPM merupakan salah satu faktor pendorong produktifnya masyarakat (tenaga kerja). Sehingga, angka harapan hidup masyarakat akan meningkat selaras dengan peningkatan kualitas penduduk. Namun, hal tersebut tersentralisasi hanya di daerah yang menjadi pusat perekonomian, terutama daerah pusat industri atau berpendapatan tinggi yang menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan dan terjadi kesenjangan sosial.

Investasi ke Ketimpangan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, investasi menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY, dengan nilai koefisien investasi 0,075. Yang artinya apabila terdapat peningkatan sebesar 1% pada investasi maka akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,075% pada ketimpangan pendapatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Danawati, Bendesa, & Utama (2016) yang mengemukakan di sebuah daerah yang sedang berkembang, peningkatan permintaan memberikan stimulasi pada pendapatan, kemudian dapat meningkatkan investasi. Sedangkan di daerah lain yang proses perkembangannya cenderung cukup lambat, selain itu permintaan akan investasi cenderung lebih minim akibat dari minimnya penawaran akan pendapatan dan modal. Dengan adanya perbedaan dalam perkembangan

di setiap daerah tersebut dan investasi cenderung berpusat di daerah yang mapan berakibat timbulnya ketimpangan.

Inflasi ke Ketimpangan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di daerah DI Yogyakarta. Koefisien variabel inflasi sebesar -0,011 dengan probabilitas sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan apabila terdapat peningkatan inflasi sebesar 1% ketimpangan akan menurun sebesar 0,011%. Maka dapat dikatakan ketika terdapat peningkatan pada inflasi, kesenjangan pada distribusi pendapatan akan berkurang. Tingkat inflasi mencerminkan bagaimana kecenderungan harga barang-barang pada periode tertentu. Phillips (dalam Pramesti & Yasa, 2019) menyatakan bahwa tingkat inflasi dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui *channel* tingkat pengangguran. Kenaikan tingkat inflasi mencerminkan keadaan dimana kenaikan permintaan agregat. Dengan adanya permintaan agregat para produsen cenderung juga meningkatkan produksinya sehingga hal tersebut akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan akhirnya akan berdampak pada pemerataan pendapatan atau dengan kata lain menurunnya ketimpangan pendapatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian mengenai pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investais dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kota/kabupaten DIY periode 2010-2019 dapat diperoleh kesimpulan bahwa hanya variable IPM yang tidak mempunyai pengaruh pada keimpangan pendapatan secara signifikan. Sementara variable inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan variable investasi memberikan pengaruh yang positif secara signifikan.

4.2 Saran

Berikut saran yang dapat diberikan:

1. Perlunya peran pemerintah di Provinsi DIY agar lebih memperhatikan pengaruh dari investasi. Pasalnya, dengan adanya investasi mengimplikasinya tambahan modal bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan pada daerah yang nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga angka ketmpangan pendapatan dapat ditekan.
2. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Akan lebih baik lagi apabila pemerintah mulai menciptakan progam-progam baru yang berfokus kepada UMKM. Demi meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat ekonomi rendah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembagkan dalam hal baik menambah variabel lain seiring dengan perkembangan ekonomi guna menunjang keterbatasan dalam penelitian ini.

5. REFERENSI

- Abdulah, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah. *JEJAK Journal of Economicsand Policy*, 6(1).
- Amri, K. & Nazamuddin. (2018). Is there causality relationship between economic growth and income equality?: Panel data evidence from Indonesia. *Eurasian Journal of Economics and Finance*. Vol. 6(2).
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia*. Diambil dari <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Gini Ratio Provinsi 2002-2020*. Diambil dari <https://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/indicator/52/296/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010.html>
- Boediono. 1994. *Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: LPBFE
- Danawati, S., Bendesar, I K. G., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 5 (7).
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, 5 (1).
- Hartono, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Jawa Tengah. *LITERATUS Literature for Social Impact and Cultural Studies*, 2(2).
- Kurniawan, R. & Huda, S. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 3 (2).
- Mahardiki, D. & Santoso, R. P. (2013). Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006-2011. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6 (2) doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596
- Mankiw, N. Gregory. (2002). *Macroeconomics* (5th ed.), New York: Worth Publisher.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan (JESP)*, 7 (2).
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. *Economics and Sociology*, 13(1), 102-115. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-1/7
- Osinubi, T. T. & Olomola, P. A. (2020). Globalization and Income Inequality in Mexico, Indonesia, Nigeria, and Turkey: A Dynamic Gmm Approach. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 7(1).
- Pramesti, D. A. D. G. & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 8(11).
- Rye, S. J. (2016). FDI and its effect on income inequality. Master's Thesis, Economics Institute, University of Oslo, Norway.
- Sultan, S., & Jamzani Sodik. (2010). Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Periode (2000-2004). *Buletin Ekonomi*, 8(1).
- Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Edisi 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanti et al. (2007). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 9 Jilid 2. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Wahiba, N. F. and El-Weriemmi, M. (2014). The relationship between economi growth and income inequality *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4(1).